

Ketika Baghdad Bersinar: Masa Emas dan Akhir Dinasti Abbasiyah 750-1258M

Shofil Fikri ^{1*}, Ahmad Maulana Bisri ², Sonia Rahmawati ³

^{1*} UIN Maulana Malik Ibrahim, Indonesia, email: h_anada@uin-malang.ac.id

² UIN Maulana Malik Ibrahim, Indonesia, email: 4hmadmaulanabisri@gmail.com

³ UIN Maulana Malik Ibrahim, Indonesia, email : soniarahmawati2306@gmail.com

Abstract

Dinamika Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) dengan menempatkan masa keemasan Baghdad dan proses keruntuhan dinasti dalam satu kerangka yang terpadu. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama, yakni: (1) faktor-faktor sosial-politik yang melatarbelakangi lahirnya Abbasiyah setelah menggulingkan Umayyah; (2) pendorong kemajuan peradaban Abbasiyah yang menjadikan Baghdad pusat ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya; serta (3) penyebab kemunduran yang bersifat internal maupun eksternal hingga puncaknya pada kehancuran Baghdad oleh bangsa Mongol tahun 1258 M. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar, DOAJ, dan Garuda menggunakan kata kunci terkait Abbasiyah, masa keemasan Islam, dan Baghdad 1258. Dari ±120 dokumen yang teridentifikasi, tersaring ±65 pada tahap screening, ±35 memenuhi kelayakan, dan 25 sumber utama dianalisis menggunakan analisis isi tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemajuan Abbasiyah dibangun oleh pemerintahan terpusat, birokrasi multietnis, stabilitas ekonomi-perdagangan, serta institusi keilmuan seperti Bayt al-Hikmah. Namun, faktor internal berupa konflik elite, melemahnya otoritas khalifah, dominasi militer, korupsi, dan disintegrasi wilayah memperlemah ketahanan negara, sehingga tekanan eksternal terutama ekspansi Mongol mempercepat keruntuhan. Kajian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kemajuan intelektual dan ketahanan politik-militer dalam menjaga keberlanjutan peradaban.

Keywords: *Dinasti Abbasiyah, Perkembangan, Kemunduran, Disintegrasi, Baghdad*

Pendahuluan

Kemenangan Dinasti Abbasiyah atas Dinasti Umayyah pada tahun 750 M merupakan salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah peradaban Islam. Peralihan kekuasaan ini tidak sekadar menggantikan satu dinasti dengan dinasti lain, tetapi menandai transformasi mendasar dalam orientasi politik, sosial, dan intelektual dunia Islam. Jika Dinasti Umayyah dikenal dengan corak pemerintahan yang berciri aristokratis Arab dan terpusat di Damaskus, maka Dinasti Abbasiyah tampil dengan visi yang lebih kosmopolitan, terbuka, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta integrasi berbagai unsur budaya non-Arab. Perubahan paradigma ini menjadi fondasi bagi lahirnya salah satu periode paling gemilang dalam sejarah Islam, yang sering disebut sebagai masa keemasan Abbasiyah.

Pemindahan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad pada masa Khalifah al-Mansur merupakan simbol sekaligus strategi politik yang sangat signifikan. Baghdad tidak hanya dirancang sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai pusat peradaban yang

menghubungkan dunia Timur dan Barat. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional menjadikan kota ini berkembang pesat sebagai pusat ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Di bawah perlindungan para khalifah Abbasiyah, khususnya pada masa Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, Baghdad menjelma menjadi kota kosmopolitan yang menampung beragam etnis, agama, dan tradisi intelektual. Pergeseran pusat kekuasaan ini menandai lahirnya orientasi baru dalam pemerintahan Islam, yang tidak lagi berbasis eksklusivitas etnis, melainkan pada kompetensi dan kontribusi intelektual (Zaitun, 2024).

Keberhasilan Dinasti Abbasiyah dalam membangun legitimasi kekuasaan tidak terlepas dari dukungan sosial yang luas, terutama dari kaum mawali, yakni muslim non-Arab yang sebelumnya mengalami marginalisasi pada masa Umayyah. Selain itu, kelompok-kelompok sosial lain yang merasa terpinggirkan juga melihat Abbasiyah sebagai harapan baru untuk mewujudkan keadilan sosial dan politik. Basis dukungan yang inklusif ini memungkinkan Abbasiyah membangun struktur pemerintahan yang relatif lebih terbuka, sekaligus mendorong tumbuhnya iklim intelektual yang kondusif. Salah satu pencapaian terbesar Abbasiyah adalah berkembangnya gerakan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya Yunani, Persia, dan India. Melalui institusi seperti Bayt al-Hikmah, ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam berbagai bidang, mulai dari filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, hingga ilmu ekonomi dan teknik (Mahesa, 2023). Aktivitas intelektual ini menjadikan Baghdad sebagai episentrum pengetahuan dunia pada abad pertengahan.

Namun, di balik kemilau kejayaan tersebut, Dinasti Abbasiyah menyimpan berbagai persoalan struktural yang secara perlahan melemahkan fondasi kekuasaannya. Dari sisi internal, konflik perebutan kekuasaan di lingkungan keluarga istana, menurunnya kewibawaan khalifah, serta menguatnya peran militer dan birokrasi daerah menciptakan fragmentasi politik yang serius. Dualisme kekuasaan antara pusat dan daerah, munculnya dinasti-dinasti otonom, serta praktik korupsi yang semakin meluas memperburuk stabilitas pemerintahan. Kondisi internal yang rapuh ini membuat Abbasiyah semakin rentan menghadapi tekanan eksternal.

Tekanan dari luar datang dalam berbagai bentuk, mulai dari Perang Salib yang menguras sumber daya politik dan militer, hingga ekspansi bangsa Mongol yang bersifat destruktif. Serangan Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan mencapai puncaknya pada tahun 1258 M dengan penghancuran Baghdad. Peristiwa ini bukan hanya menandai runtuhnya kekuasaan politik Abbasiyah secara formal, tetapi juga menjadi simbol kehancuran pusat peradaban Islam yang telah berkembang selama lebih dari lima abad (Ilham & Rama, 2024). Tragedi ini memperlihatkan betapa lemahnya sebuah peradaban besar ketika kemajuan intelektual tidak diimbangi dengan ketahanan politik dan militer yang memadai.

Meskipun kajian mengenai Dinasti Abbasiyah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian cenderung menyoroti aspek tertentu secara terpisah, seperti kejayaan ilmu pengetahuan, peran khalifah tertentu, atau faktor eksternal seperti invasi Mongol. Kajian yang mengintegrasikan analisis masa keemasan, dinamika politik internal, serta tekanan eksternal dalam satu kerangka yang komprehensif masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah yang menunjukkan adanya research gap dan menegaskan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami perjalanan Dinasti Abbasiyah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses terbentuknya masa keemasan Dinasti Abbasiyah, mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menyebabkan melemahnya stabilitas politik, serta menganalisis peran ancaman eksternal dalam mempercepat keruntuhan dinasti tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara kemajuan intelektual, stabilitas politik, dan ketahanan sebuah pemerintahan dalam mempertahankan eksistensi peradaban besar sepanjang sejarah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji secara komprehensif dinamika masa keemasan dan keruntuhan Dinasti Abbasiyah pada periode 750–1258 M. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis historis dan interpretatif terhadap fenomena sosial, politik, dan intelektual yang berkembang dalam konteks sejarah tertentu. Metode ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antarfaktor secara mendalam tanpa melakukan manipulasi terhadap data historis (Fadli, 2021). SLR digunakan untuk memastikan bahwa proses penelusuran, seleksi, dan analisis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Proses SLR dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap utama, yaitu perumusan pertanyaan penelitian, strategi pencarian literatur, seleksi artikel, ekstraksi data, dan sintesis temuan.

Strategi pencarian literatur dilakukan melalui basis data ilmiah dan sumber akademik yang relevan, seperti *Google Scholar*, DOAJ, Garuda, serta perpustakaan digital nasional dan internasional. Kata kunci yang digunakan antara lain Dinasti Abbasiyah, Abbasiyah Caliphate, Islamic Golden Age, Baghdad 1258, keruntuhan Abbasiyah, dan peradaban Islam abad pertengahan. Pencarian dibatasi pada literatur yang relevan dengan periode Abbasiyah, baik yang membahas aspek kejayaan intelektual, dinamika politik internal, maupun faktor eksternal seperti Perang Salib dan invasi Mongol.

Pada tahap identifikasi awal, diperoleh sebanyak ±120 dokumen yang terdiri dari artikel jurnal, buku akademik, prosiding, dan sumber historis. Selanjutnya dilakukan tahap penyaringan (*screening*) berdasarkan judul dan abstrak untuk menghilangkan duplikasi serta literatur yang tidak relevan, sehingga tersisa ±65 dokumen. Tahap kelayakan (*eligibility*) dilakukan dengan membaca teks secara penuh dan menilai kualitas serta kesesuaian substansi dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, ±35 dokumen dinyatakan memenuhi kriteria inklusi. Akhirnya, sebanyak 25 sumber utama dipilih untuk dianalisis secara mendalam sebagai basis kajian dalam penelitian ini. Kriteria inklusi meliputi: (1) relevansi langsung dengan Dinasti Abbasiyah; (2) pembahasan mengenai masa keemasan, dinamika internal, atau faktor eksternal; dan (3) kredibilitas akademik sumber. Adapun kriteria eksklusi mencakup literatur populer tanpa dasar ilmiah yang kuat dan sumber yang hanya membahas Abbasiyah secara deskriptif tanpa analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan tematik. Literatur yang terpilih diklasifikasikan ke dalam tema-tema utama, yaitu (1) faktor pendukung masa keemasan Abbasiyah, (2) dinamika politik dan kelembagaan internal, dan (3) peran ancaman eksternal terhadap keruntuhan dinasti. Sintesis hasil dilakukan secara naratif-analitis untuk mengintegrasikan temuan lintas sumber sehingga mampu menjawab *research gap* yang telah diidentifikasi. Untuk menjaga keabsahan penelitian, dilakukan triangulasi sumber, dengan membandingkan literatur klasik dan kajian kontemporer dari

berbagai perspektif. Dengan pendekatan SLR ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang sistematis dan utuh mengenai hubungan antara kemajuan peradaban, stabilitas politik, dan ketahanan Dinasti Abbasiyah dalam lintasan sejarah Islam.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Pembentuk Dinasti Abbasiyah

Dinasti dapat didefinisikan sebagai keturunan dari keluarga berpengaruh yang mempertahankan kekuasaan selama periode waktu yang panjang, seperti halnya dinasti di Mesir atau Arab Saudi. Istilah ini juga dapat merujuk pada kelompok-kelompok berpengaruh di bidang tertentu yang mengendalikan suatu industri dan mewariskan posisinya kepada penerus mereka, misalnya, dinasti di dunia sastra atau perbankan (Hady, 2018). Dinasti ini disebut Abbasiyah karena para pendiri sekaligus pemimpinnya merupakan keturunan Abbas, yang merupakan paman Nabi Muhammad Saw (Pertiwi & Nirmayuni, 2024). Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, yang lebih dikenal dengan nama Abu Al-Abbas Al-Saffah. Latar belakang berdirinya Dinasti Abbasiyah dikaitkan dengan ketidakpuasan berbagai bagian masyarakat Islam terhadap kebijakan Dinasti Umayyah, terutama dari kalangan mawali (Muslim non-Arab), kelompok Syiah, dan orang-orang yang tinggal di wilayah timur seperti Khurasan.

Kebijakan diskriminatif yang lebih mengutamakan bangsa Arab pada akhir pemerintahan Umayyah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mawali, yang telah memeluk Islam tetapi tidak mendapatkan hak politik dan sosial yang sama (Wulandari et al., 2025). Pembentukan Dinasti Abbasiyah dimulai melalui dua langkah utama. Pertama, mereka mendekati tujuan mereka secara diam-diam dengan mencari dukungan dan menyebarkan ide-ide mereka secara rahasia. Upaya ini telah berlangsung sejak akhir abad pertama Hijriah, berpusat di Syam, khususnya di Al-Hamimah, dan mencapai titik balik ketika Abu Muslim Al-Khurasani bergabung dengan kelompok yang mendukung pembentukan dinasti tersebut. Strategi kedua dilakukan secara terbuka melalui seruan dan undangan di berbagai forum resmi untuk mendirikan Dinasti Abbasiyah, yang kemudian diikuti oleh konfrontasi militer melawan Dinasti Umayyah. Melalui dua strategi yang dilakukan oleh Muhammad bin Al-Abbas dan pendukungnya dari akhir abad pertama hingga 132 AH/750 M, upaya-upaya ini akhirnya berhasil mendirikan Dinasti Abbasiyah (Ibrahim, 2021).

Pada era Dinasti Abbasiyah, terdapat perbedaan sosial yang mencolok antara orang Arab dan non-Arab meskipun pemimpin mereka menyatakan komitmennya pada prinsip kesetaraan dalam Islam. Orang Arab tetap diakui berada pada level sosial yang lebih tinggi dan dianggap sebagai kelompok yang lebih terhormat karena garis keturunan mereka. Di sisi lain, kelompok non-Arab, terutama para mawali yang merupakan individu non-Arab yang telah masuk Islam, sering kali mengalami perlakuan tidak adil dan diskriminasi. Mereka sering dipandang sebagai warga kelas dua dan tidak mendapatkan hak-hak yang setara dalam hal distribusi harta rampasan perang maupun posisi dalam struktur pemerintahan. Selain itu, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi negara dan budaya Arab dianggap sebagai acuan utama, sehingga non-Arab harus beradaptasi dengan bahasa dan budaya tersebut untuk dapat diterima serta meningkatkan status sosial mereka.

Meskipun kemudian orang non-Arab, khususnya dari Persia, mulai memperoleh lebih banyak kesempatan dalam dunia birokrasi dan pemerintahan, kesenjangan sosial dan

diskriminasi berbasis etnis ini tetap menjadi isu yang terus mengganggu masyarakat pada masa Dinasti Abbasiyah. Pada era Dinasti Abbasiyah, berbagai upaya perlawanan muncul dengan tujuan mengadvokasi keadilan sosial dan menghilangkan diskriminasi terhadap kelompok non-Arab, terutama kaum mawali. Salah satu dari gerakan yang signifikan adalah Syu'ubiyah, yang digerakkan oleh komunitas non-Arab, terutama orang Persia. Gerakan ini menolak pandangan yang menganggap bangsa Arab lebih unggul dan menyerukan agar budaya, bahasa, serta hak-hak kaum non-Arab dihormati sejajar dengan bangsa Arab. Di samping itu, kaum mawali dan kelompok non-Arab lainnya mulai meminta perlakuan yang setara dalam administrasi dan distribusi hak-hak sosial. Pergerakan ini tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik, sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dan diskriminasi yang masih berlangsung dalam masyarakat Abbasiyah.

Perjuangan ini, terdapat perubahan secara bertahap dalam struktur sosial dan pemerintahan, yang memungkinkan bangsa non-Arab memperoleh posisi yang lebih signifikan dalam birokrasi, militer, dan kehidupan intelektual, sehingga mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Simpatik dari masyarakat Irak, Persia, dan Khurasan jadi fondasi utama keberhasilan gerakan Abbasiyah dalam menjatuhkan Dinasti Umayyah. Ketiga kelompok ini merasakan penindasan di bawah pemerintahan Umayyah yang dikuasai oleh keturunan Arab dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat non-Arab. Khususnya, Persia dan Khurasan memberikan dukungan yang sangat besar karena mereka mendambakan sistem pemerintahan yang lebih adil serta kesempatan yang setara untuk semua umat Islam tanpa membedakan latar belakang etnis. Dengan dukungan yang melimpah dari warga di kawasan tersebut, gerakan Abbasiyah mampu merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti baru yang awalnya menjanjikan keadilan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat.

Selama Dinasti Umayyah, sistem perpajakan dianggap memberatkan. Salah satu contohnya adalah para petani dikenakan pajak yang berat dan tidak diperlakukan dengan belas kasihan, sehingga sektor pertanian tidak berkembang dan tidak memberikan kontribusi sesuai harapan. Selama Dinasti Umayyah, terdapat pemborosan uang yang besar untuk mempertahankan status quo para pemimpin (Dieke, 2023). Klaim hubungan darah dengan Abbas bin Abdul Muthalib oleh Dinasti Abbasiyah memiliki peranan krusial dalam menciptakan legitimasi politik mereka. Walaupun Abbas tidak dianggap sebagai bagian dari Ahlul Bayt menurut pandangan sebagian besar Muslim, klaim ini dimanfaatkan oleh Abbasiyah untuk menggalang dukungan dari beragam kelompok, termasuk mereka yang berharap pemimpin berasal kembali dari kerabat Nabi.

Pemanfaatan legitimasi religius oleh Abbasiyah tercermin dalam usaha mereka memperkuat posisi politik mereka melalui cerita-cerita keagamaan. Mereka menyoroti pentingnya kepemimpinan yang berasal dari Ahlul Bayt, meskipun klaim ini tidak selalu diakui secara teologis. Contohnya, pada masa pemerintahan Al-Qadir, dikeluarkan sebuah manifesto yang membantah klaim keturunan Fatimiyah dari Ali serta Ahlul Bayt, dan menegaskan jalur silsilah dari tokoh lain sebagai dasar kepemimpinan mereka. Manifesto ini didistribusikan di seluruh wilayah Abbasiyah dan menunjukkan bagaimana legitimasi spiritual digunakan untuk mengokohkan klaim politik mereka.

Kemajuan Dinasti Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dibandingkan dengan Dinasti Umayyah. Setelah Al-Mansur menetapkan Baghdad sebagai ibu kota, para

khalifah dapat mengendalikan kebijakan secara langsung berkat dukungan struktur birokrasi yang efisien, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan terorganisir. Pada periode ini, peradaban dan budaya Islam berkembang pesat dan mencapai masa keemasannya. Hal ini karena Dinasti Abbasiyah lebih fokus pada kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya Islam daripada perluasan wilayah. Dinasti Abbasiyah mengadopsi model pemerintahan yang lebih terpusat dibandingkan dengan Dinasti Umayyah. Sejak Al-Mansur menetapkan Baghdad sebagai pusat pemerintahan, khalifah dapat secara langsung mengatur berbagai kebijakan dengan dukungan birokrasi yang terorganisir dengan baik, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan sistematis. Selama periode ini, peradaban dan budaya Islam mengalami perkembangan pesat, mencapai puncak kejayaannya.

Hal ini disebabkan oleh orientasi Dinasti Abbasiyah yang lebih menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya Islam daripada perluasan wilayah (Azmirrijali, 2025). Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, kegiatan pendidikan dan pengajaran berkembang sangat pesat, sehingga baik anak-anak maupun orang dewasa bersemangat dan berlomba-lomba dalam menuntut ilmu pengetahuan (Nunzairina, 2020). Setelah Khalifah al-Mansur membangun Baghdad sebagai kota baru, pusat pemerintahan dipindahkan dari Damaskus. Baghdad kemudian berkembang pesat menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Upaya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan secara luas dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Ja'far al-Mansur, yang mengundang banyak ulama dan cendekiawan dari berbagai wilayah untuk menetap di Baghdad. Ia juga menginisiasi pengkodifikasian berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama seperti fiqh, tafsir, tauhid, dan hadits, maupun ilmu lain seperti bahasa, sejarah, dan bidang pengetahuan lainnya (Nurtanti & Wulandari, 2023).

Kemudian, dibangunlah bangunan yang bernama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah (sering juga disebut Bayt al-Hikmah) adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti "Rumah Kebijaksanaan" atau "Rumah Hikmah". Baitul Hikmah yang menjadi pusat peradaban intelektual pada masa Dinasti Abbasiyah (Khaeruddin, 2024). Pada masa kejayaannya, Dinasti Abbasiyah mencapai kemajuan yang luar biasa di bidang ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Aktivitas ekonomi berkembang pesat melalui perdagangan dan industri, didukung oleh perkembangan sektor industri dan pertanian, yang diperkuat oleh sistem irigasi yang baik dan lokasi strategis Baghdad sebagai pusat perdagangan internasional antara Eropa, Asia, dan Afrika. Sistem keuangan modern juga mulai muncul, termasuk penggunaan cek dan lembaga perbankan untuk memfasilitasi transaksi. Berbagai inovasi dalam pertanian juga meningkatkan produksi, sehingga mendukung perkembangan perdagangan dan industri.

Khalifah Harun al-Rashid juga mendorong kemajuan ekonomi dengan meningkatkan kualitas sistem irigasi pertanian dan menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan terbesar pada masanya. Pendapatan negara dari pajak perdagangan dan hasil tanah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dikelola tanpa korupsi (Sundari et al., 2024). Pusat perdagangan Abbasiyah berada di Mesopotamia yang strategis dengan akses ke Teluk Persia dan jalur perdagangan penting ke Asia Tengah, India, dan Tiongkok melalui Jalur Sutra. Berbagai barang seperti sutra, rempah-rempah, logam mulia, dan keramik diperdagangkan yang menciptakan kontribusi besar bagi keuangan negara (Kusumastuti et al., 2025). Ekonomi didukung oleh industri seperti kain linen, sutra, perhiasan, dan tekstil serta pertambangan logam berharga. Urbanisasi berkembang seiring

dengan industrialisasi di kota-kota seperti Baghdad, Bashrah, dan Aleksandria (Nurtanti & Wulandari, 2023).

Selama Dinasti Abbasiyah, terjadi kemajuan pesat dalam bidang seni dan budaya sebagai bagian dari transformasi peradaban Islam dari kehidupan pedesaan yang sederhana menjadi kehidupan perkotaan yang makmur. Seni berkembang dalam berbagai bentuk seperti sastra, musik, arsitektur, dan kaligrafi yang mendapat dukungan penuh dari para khalifah Abbasiyah (Sanjaya et al., 2023). Seni sastra mengalami kemajuan dengan berkembangnya puisi, prosa, dan syair. Banyak karya sastra yang diterjemahkan dari bahasa India dan Yunani, serta karya-karya asli dari sastrawan besar seperti Abu Nawas dan Al-Jahiz. Karya "Seribu Satu Malam" menjadi salah satu warisan sastra penting pada masa itu (Sandrina & Sudjatnika, 2025). Meskipun telah ada pertentangan sebelumnya mengenai izin musik dalam agama Islam, pengembangan seni musik menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Beberapa alat musik yang terkenal di zaman Abbasiyah meliputi harpa, obo, alat musik gesek, drum, dan kecapi.

Para pemimpin memberikan perhatian yang besar untuk mendorong kemajuan dalam bentuk-bentuk seni musik. Di bidang arsitektur, Dinasti Abbasiyah membangun istana, masjid, dan bangunan megah yang menjadi simbol kejayaan dan kemajuan seni. Contoh karya arsitektur terkenal adalah Masjid Agung Samarra dan Istana Ibnu Thulun. Seni kaligrafi juga mengalami perkembangan dengan dirumuskan metode penulisan kaligrafi yang menjadi standar hingga kini. Kebudayaan Abbasiyah merupakan hasil akulturasi antara budaya Arab, Persia, India, dan Yunani yang menghasilkan kesenian yang beragam dan kaya. Lembaga ilmu seperti Baitul Hikmah menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang mendorong kemajuan seni dan literasi (Ibrahim, 2021).

Sistem pemerintahan terpusat yang dianut oleh Dinasti Abbasiyah dibentuk berdasarkan empat pilar utama: Khalifah, Wizarah, Kitabah, dan Hijabah. Khalifah berfungsi sebagai penguasa mutlak, menjalankan kekuasaan politik sekaligus memimpin agama dalam suatu sistem teokrasi, di mana sahnya kekuasaan dianggap bersumber langsung dari Allah. Wazir berperan sebagai tangan kanan Khalifah, yang bertugas mengatur berbagai departemen pemerintahan dan membagi kekuasaan antara wazir at-tafwidh (yang memiliki kekuasaan luas) dan wazir at-tanfudz (yang menjalankan kebijakan). Struktur birokrasi yang sistematis ini dibantu oleh pegawai dan menteri dari berbagai etnis, terutama keturunan Persia (mawali), yang memiliki peranan krusial dalam administrasi dan pemerintahan. Kota Baghdad sebagai ibu kota menjadi pusat kegiatan politik yang terbuka untuk beragam bangsa dan agama, menjadi pusat internasional yang mengokohkan kekuasaan terpusat Abbasiyah (Hasibuan, 2022).

Khalifah juga menerapkan sistem suksesi yang menetapkan putra mahkota sebagai pengganti, meskipun hal ini kadang menimbulkan konflik perebutan kekuasaan di dalam keluarga dinasti. Namun, dengan sistem pemerintahan yang kuat dan birokrasi yang efektif, Dinasti Abbasiyah bisa mengelola negara secara terpusat dan menjalankan kebijakan yang ketat, terutama dalam bidang pemerintahan, keuangan, dan keamanan (Ramadhana et al., 2024). Kemajuan yang dicapai dalam pemerintahan terpusat era Abbasiyah berakar pada kewenangan tertinggi Khalifah, dukungan birokrasi multietnis yang efisien, pengawasan administratif melalui wazir dan katib, serta pusat pemerintahan yang kuat yang berlokasi di Baghdad.

Kemunduran Dinasti Abbasiyah

Pada masa kemajuan, Dinasti Abbasiyah menguasai wilayah yang cukup luas, membentang dari Afrika Utara sampai ke Asia Tengah, sehingga sulit untuk dikelola secara efektif dari pusat pemerintahan di Baghdad. Pengelolaan wilayah yang begitu luas menimbulkan masalah administrasi, komunikasi, dan pengendalian militer, yang pada akhirnya melemahkan kekuasaan pusat. Kemunduran Dinasti Abbasiyah yang dimulai dari munculnya dinasti-dinasti kecil (era disintegrasi) atau dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad merupakan faktor internal utama yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan sentral Abbasiyah. Munculnya dinasti-dinasti kecil ini dipicu oleh lemahnya penguasa Abbasiyah dalam mengendalikan wilayah sangat luas yang menjadi kekuasaannya. Sistem komunikasi dan administrasi yang belum maju membuat daerah terpencil semakin sulit dikontrol, sehingga banyak wilayah mulai mendeklarasikan otonomi atau kemerdekaan. Contoh dinasti kecil tersebut antara lain Bani Saljuk, Bani Buwaih, serta kekuatan-kekuatan lain di wilayah Mesir dan Persia yang mulai berkuasa sendiri secara *de facto*. Perpecahan politik ini diperparah oleh konflik internal, seperti perang saudara antara Al-Amin dan Al-Makmun yang menyebabkan splinterisasi kekuasaan antara kubu Arab dan Persia serta konflik horizontal di dalam umat Islam sendiri. Selain itu, perebutan kekuasaan antar elite dinasti dan munculnya korupsi serta nepotisme memperlemah pemerintahan pusat.

Situasi ini mengakibatkan Baghdad semakin kehilangan pengaruh politiknya, yang kemudian hanya menjadi simbol formal kekhalifahan tanpa kendali penuh atas daerah-daerah luasnya. Disintegrasi ini membuka jalan bagi serangan eksternal seperti invasi Mongol yang akhirnya menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 M, menghentikan kejayaan Dinasti Abbasiyah secara nyata. Dengan demikian, kemunculan dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri menandai era disintegrasi politik yang sangat menentukan kemunduran Dinasti Abbasiyah (Fathiha, 2021). Jadi, Kemerossotan yang dialami oleh kekhalifahan Abbasiyah sangat terkait dengan terbentuknya kerajaan - kerajaan mini yang terpecah belah daerah kekuasaan dan mengakibatkan berkurangnya kendali utama dari Bagdad, yang pada akhirnya berakhir pada kehancuran total kekuatan Abbasiyah.

Kemunduran Dinasti Abbasiyah sangat dipengaruhi oleh lemahnya otoritas khalifah, yang berujung pada runtuhnya kekhalifahan itu sendiri. Dalam masa ini, khalifah kehilangan kekuatan yang sejati dan lebih berfungsi sebagai simbol belaka, sebab sebagian besar kekuasaan politik dan militer dipegang oleh tentara bayaran, terutama pasukan Turki yang awalnya diambil sebagai kekuatan militer utama. Ketergantungan yang berlebihan pada pasukan ini justru menjadikan khalifah sebagai boneka yang dikendalikan oleh kelompok militer dan elit penguasa lainnya seperti keluarga Bani Buwaih yang berperan penting. Ketidakmampuan khalifah dalam mengelola wilayah kekuasaan yang begitu luas, disertai komunikasi dan birokrasi yang lambat, memperburuk keadaan. Selain itu, kondisi keuangan negara semakin memburuk akibat tingginya biaya untuk menggaji tentara serta korupsi pejabat dan gaya hidup glamor para penguasa. Kepercayaan dan loyalitas antara penguasa pusat dengan otoritas daerah yang semakin mandiri juga mengalami penurunan.

Perselisihan perebutan kekuasaan yang terus-menerus semakin menggerus stabilitas politik, sehingga khalifah hanya berperan sebagai simbol tanpa memberikan pengaruh yang signifikan dalam aspek politik dan militer. Situasi ini menjadi faktor utama dalam kemunduran Dinasti Abbasiyah, di mana wilayah kekuasaannya terpecah dan serangan eksternal seperti invasi Mongol pada tahun 1258 M benar-benar menghancurkan Baghdad. Kemunduran Dinasti Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh lemahnya kekuasaan khalifah

yang pada akhirnya hanya menjadi simbol tanpa pengaruh politik dan militer nyata. Ketergantungan pada tentara bayaran, terutama pasukan Turki, menyebabkan khalifah dikendalikan oleh kelompok militer dan elite penguasa lainnya. Selain itu, pengelolaan wilayah yang sangat luas dengan birokrasi dan komunikasi yang buruk juga memperparah kondisi. Keuangan negara memburuk akibat biaya tinggi membayar tentara dan korupsi, diikuti menurunnya loyalitas daerah-daerah yang mulai mandiri atau memerdekakan diri.

Perebutan kekuasaan internal terus terjadi sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik. Kondisi ini berkontribusi besar pada kemunduran Abbasiyah, yang diakhiri dengan invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 M (Nurtanti & Wulandari, 2023). Keterpurukan Dinasti Abbasiyah juga ditunjukkan oleh pengaruh luar yang kuat dalam aspek politik dan pemerintahan mereka. Dengan semakin lemah kekuasaan khalifah, kelompok-kelompok asing seperti pasukan bayaran Turki dan beberapa dinasti kecil mulai mengontrol arena politik. Kehadiran pasukan Turki bahkan menjadikan khalifah sebagai figura yang diatur oleh militer asing. Selain itu, dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari kekuasaan pusat Abbasiyah juga menerima pengaruh budaya dan politik dari bangsa asing seperti Persia dan Turki.

Situasi ini menyebabkan hilangnya kendali pusat atas wilayah yang luas dan memicu disintegrasi kekhalifahan Abbasiyah (Zam et al., 2024). Sebelum agresi oleh bangsa Mongol, Dinasti Abbasiyah telah mengalami penurunan akibat perpecahan internal, lemahnya kendali para khalifah, serta dominasi dinasti-dinasti kecil yang merdeka dari kekuasaan utama. Sebagai pusat pemerintahan dan budaya Islam, Baghdad sudah tidak lagi mampu mempertahankan kekuasaannya dengan efektif. Kepemimpinan Hulagu Khan, yang merupakan keturunan Jengis Khan, meluncurkan serangan terhadap wilayah Abbasiyah sebagai bagian dari rencana ekspansi besar-besaran kekaisaran Mongol untuk menguasai area strategis serta sumber daya ekonominya. Faktor lain yang memicu serangan ini adalah ketegangan diplomatik, di mana kalangan Mongol menyampaikan permohonan damai yang ditolak oleh khalifah Al-Musta'shim.

Bangsa Mongol merupakan kelompok nomaden asal Asia Tengah yang dipersatukan oleh Jengis Khan pada permulaan abad ke-13. Mereka dikenal sebagai penakluk yang disiplin, menggunakan taktik militer yang inovatif dan berhasil menaklukkan area luas dari Asia Tengah hingga Timur Tengah, termasuk kekhalifahan Abbasiyah. Pasukan Mongol yang terlatih dengan baik menerapkan strategi pengepungan yang kejam, menghancurkan pertahanan Baghdad pada tahun 1258. Agresi ini menyebabkan kerusakan besar-besaran, termasuk penghancuran pusat pengetahuan seperti Baitul Hikmah, yang menandai berakhirnya kemegahan politik dan budaya Dinasti Abbasiyah.

Invasi Mongol juga menandai dimulainya era baru dengan munculnya dinasti Mongol Islam yang selanjutnya mengadopsi ajaran Islam dalam sistem pemerintahannya, sementara kemunduran Dinasti Abbasiyah lebih banyak disebabkan oleh faktor internal seperti perebutan kekuasaan, lemahnya posisi khalifah, dominasi dinasti kecil yang merdeka, dan pengaruh asing khususnya serangan militer Mongol yang melenyapkan Baghdad pada tahun 1258. Faktor internal tersebut termasuk konflik antar elite, korupsi, ketergantungan khalifah pada pasukan bayaran Turki, dan lemahnya kendali politik pusat terhadap wilayah luas. Jadi, kemunduran Abbasiyah lebih didorong oleh kombinasi masalah internal kelemahan kepemimpinan dan tekanan eksternal dari bangsa asing seperti Mongol (Fathiha, 2021).

Kesimpulan

Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) merupakan salah satu fase paling menentukan dalam sejarah peradaban Islam karena berhasil menggeser orientasi kekuasaan dari pola aristokratis Arab pada era Umayyah menuju tatanan yang lebih kosmopolitan dan inklusif. Pemandangan pusat pemerintahan ke Baghdad menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi politik sekaligus mendorong lahirnya pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia Islam. Dukungan sosial dari kaum mawali, masyarakat Persia–Khurasan, serta kelompok-kelompok yang merasa terdiskriminasi pada masa Umayyah memperkuat legitimasi awal Abbasiyah dan membuka ruang bagi birokrasi multietnis. Melalui gerakan penerjemahan dan institusi seperti Bayt al-Hikmah, Abbasiyah mencapai kemajuan besar dalam bidang pendidikan, ekonomi, perdagangan, seni, dan tata kelola pemerintahan terpusat. Namun, kejayaan tersebut tidak berlangsung stabil karena dinasti ini menghadapi persoalan struktural yang menggerogoti dari dalam: konflik suksesi, melemahnya otoritas khalifah, dominasi militer (terutama pasukan Turki), korupsi, serta disintegrasi wilayah melalui munculnya dinasti-dinasti otonom. Kerentanan internal ini kemudian diperparah oleh tekanan eksternal, terutama Perang Salib dan ekspansi Mongol. Puncaknya, penaklukan Baghdad oleh Hulagu Khan pada 1258 M menandai berakhirnya dominasi politik Abbasiyah sekaligus kehancuran simbol pusat peradaban Islam. Keruntuhan Abbasiyah merupakan hasil interaksi kompleks antara kemajuan intelektual yang besar, lemahnya ketahanan politik-militer, dan tekanan geopolitik yang meningkat.

Acknowledgment

Daftar Pustaka

- Azmirrijali, Z. (2025). Peran Kelompok Minoritas Mawali dalam Pengembangan Islam Masa Dinasti Abbasiyah. *MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 16(1), 23-45. <https://doi.org/10.21831/mozaik.v16i1.76448>
- Dieke, D. H. K. (2023). Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa Kini. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 117–126. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fathiha, N. (2021). Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah (Periode Kemunduran). *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.21831/istoria.v17i1.38076>
- Hady, N. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/Puu-Xiii/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang. *Arena Hukum*, 11(3), 484–499. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.4>
- Ibrahim, A. (2021). Kota Bagdad sebagai Central Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 43–54. <https://doi.org/10.32505/lentera.v3i1.3083>
- Ilham, M., & Rama, B. (2024). Biografi Para Khilafah dan Kegemilangannya Peradaban Islam pada Masanya sampai Diruntuhkan oleh Bangsa Mongol. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 185–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2773>

- Khaeruddin. (2024). Baitul Hikmah Sebagai Pusat Peradaban Intelektual Pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 8, 1–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/tajdid.v8i1.1918>
- Kusumastuti, D. A., Khobir, A., Islam, U., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2025). *Baitul Hikmah Pusat Keemasan Ilmu Pengetahuan Dinasti Abbasiyah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i1.597>
- Mahesa, L. P. (2023). *Manajemen Perpustakaan Baitul Hikmah Pada Masa Bani Abbasiyah*. 3(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.61456/tjiec.v3i2.98>
- Nunzairina, N. (2020). Dinasti Abbasiyah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan, dan Kebangkitan Kaum Intelektual. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 93. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4382>
- Nurtanti, A., & Wulandari, N. D. (2023). Masa the Golden Age Dan Kemunduran Dinasti Abbasiyah. *Jambura History and Culture Journal*, 5(1), 70–81. <https://doi.org/10.37905/jhcj.v5i2.20702>
- Pertiwi, G. R., & Nirmayuni, D. (2024). Tinjauan Kritis Peradaban Islam Pada Masa Bani Abbasiyah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 2(1), 43-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v2i1.297>
- Ramadhana, M. N., Daulay, H. P., & Sumanti, S. T. (2024). Proses Kemunculan dan Kemajuan Dinasti Fatimiyah. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 3529-3535. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1704>
- Wulandari, R., Febriyanti, N., Hermalisa, H., Audiska, N., Putri, I. F., Desfika, T., & Fuadi, S. (2025). Sejarah dan Peran Dinasti Abbasiyyah antara Tahun 750 Hingga 1258 M dalam Peradaban Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(4), 134-145. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i4.1373>
- Sandrina, A. M., & Sudjatnika, T. (2025). *Peran Sastra dalam Menyebarkan Nilai-Nilai Keislaman pada Masa Dinasti Abbasiyah*. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i3.2557>
- Sanjaya, M. B., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *Dalam Islam Dan Perkembangannya*. 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.59548/js.v1i1.57>
- Sundari, I., Ritonga, A., & Nasution, A. (2024). Kemunduran Dinasti Abbasiyah dan Dampak Invasi Mongol Terhadap Peradaban Islam. *Journal Arrayah*, 8(4), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1217>
- Hasibuan, S. S. (2022). Perkembangan Islam Zaman Keemasan Bani Abbasiyah (650 M–1250 M). *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 5(4). <https://doi.org/10.47006/er.v5i4.12934>
- Zaitun, A. (2024). Pengaruh Dinasti Abbasiyah Terhadap Kemajuan Peradaban Islam. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(2), 113–124. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i2.2362>
- Zam, Z., Alawi, S. A., Negeri, I., Syarif, S., Markaz, Y., & Al, K. (2024). *Sistem Pemerintahan Desentralisasi: Studi atas Penyebab Keruntuhan Daulah ' Abbasiyah*. 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.59548/js.v1i2.119>